

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat terletak di bagian Barat Pulau Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara sampai $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan serta $98^{\circ} 36'$ sampai $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah $42.297,30 \text{ km}^2$ (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2019).

Posisi geografis Kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua, oleh karena itu potensi sumberdaya hayati Indonesia sebagai negara tropis kaya akan keanekaragaman hayati salah satunya dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia terdiri dari, ikan pelagis besar (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton), demersal (1,36 juta ton). lobster (0,004 juta ton), cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan-ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan sebanyak 5,12 juta ton per tahun yang tersebar di sembilan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (Lasabuda, 2013).

Kota Padang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) $486,209 \text{ km}^2$. Batas wilayah kota Padang sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah

Timur Kabupaten Solok dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia (DKP Provinsi Sumatera Barat, 2019).

Kota Padang merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik perikanan yang kompleks, pada satu sisi mempunyai potensi perikanan laut yang potensial dan sisi lain dihadapkan pada kondisi daerah yang rawan bencana. Kondisi ini menurut suatu kebijakan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam hal pengembangan sumber daya perikanan baik oleh faktor internal maupun eksternal. Potensi perikanan melahirkan program pengelolaan dan pengembangan, sementara potensi bencana menuntut adanya tindakan mitigasi. Untuk itu, dalam pengambilan kebijakan terkait kondisi ini, perlu mempertimbangkan faktor pemerintah dan masyarakat (Ramadona dkk., 2012).

Kapal penangkap ikan salah satu faktor penting di antara komponen armada perikanan tangkap berupa alat tangkap, perlengkapan penangkapan, modal kerja dan tenaga kerja yaitu nelayan. Menurut Sofiyanti (2016), Kapal penangkap ikan menurut Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan adalah kapal, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Departemen Perhubungan Laut, kapal penangkapan juga harus memenuhi persyaratan yang harus ditaati seperti kemampuan berlayar yang cukup aman dalam kondisi apapun, efisien, hal ini dapat dilihat dari ukuran, tenaga, biaya, produk dan tujuan penggunaan guna perencanaan kapal yang layak digunakan untuk melaut.

Kapal ikan yang banyak digunakan pada umumnya berbahan kayu dan teknik pembuatan kapal di Indonesia masih dilakukan secara tradisional yang telah turun temurun dalam pembangunannya, bahan kapal kayu tradisional mempunyai kualitas yang baik sehingga nelayan dapat memanfaatkan kualitas kayu untuk pembangunan kapal secara maksimal akan tetapi dengan perhitungan arsitektur perkapalan (*naval architec*) masih terdapat banyak kapal yang kurang efektif dalam melakukan penangkapan ikan dan berdampak juga pada hasil tangkapan, walaupun demikian kapal masih dapat menjalankan fungsi yang semestinya (Lasibani, 2011).

Kegiatan perikanan, untuk itu kapal perikanan bukan hanya sebagai penangkap ikan kapal perikanan dapat digunakan untuk penelitian pengawasan dan latihan di bidang perikanan dan kapal juga berperan sebagai pengangkut hasil perikanan. Menurut Pasaribu (2010), kapal perikanan memiliki khusus tersendiri yang disebabkan oleh bervariasinya kerja atau aktifitas yang dikerjakan, dalam operasional penangkapan dilakukan beberapa aktifitas antara lain (*fishing ground*), mengoperasikan alat tangkap, mengejar kelompok ikan dan sebagai tempat menampung hasil tangkapan, oleh karena itu desain konstruksi kapal tergantung pada jenis pengoperasiannya.

Kapal Bagan merupakan salah satu kapal penangkap ikan yang masih minim ditemui di wilayah Sungai Pisang, karena 5 tahun yang lalu masyarakat nelayan setempat masih menggunakan Kapal Tonda dan merubah/merenovasi Kapal Tonda tersebut menjadi Kapal Bagan dengan alasan kurang efisien dari segi materil dan waktu. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“Kajian Konstruksi Kapal Bagan di Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang”.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji konstruksi kapal perikanan bagan di Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang, yang meliputi ukuran utama kapal bagan, ukuran bagian dan metode konstruksi serta jenis material kayu yang digunakan dalam pembangunan kapal bagan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada setiap individu atau lembaga tentang konstruksi kapal bagan di Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang, mulai dari pembuatnya hingga material yang digunakan dalam proses pembuatan kapal bagan tersebut.